

Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

Freddie Lasmara¹⁾; Sri Rahayu²⁾

¹⁾ DPPKAD Kabupaten Kerinci

²⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

Abstract.

This study aimed to analyze the effect of the competence of human resources, support tools and the role of the internal auditor of the quality of local government financial statements Kerinci. The method used is quantitative, criteria respondents in this study those concerned and involved technically in financial management, evaluating financial, and preparation of financial reporting in local government agencies Kerinci of 27 SKPD each SKPD researchers took four respondents consist of Subsection Head of Finance, Kasubbag Program, Evaluation and Reporting, Spending Treasurer and Treasurer Storage of Goods. Data processed by using multiple regression analysis. The results of this study demonstrate that the competence of human resources, support tools and the role of internal auditors jointly positive effect on the quality of financial reports of local government Kerinci district, the dominant factor is the competence of human resources this caused that for the preparation of financial statements required human resources who understand the financial management procedures.

Keywords: Human Resources, Financial Management, Role of Internal Auditor

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, Kriteria responden dalam penelitian ini mereka yang berkaitan dan terlibat langsung secara teknis dengan pengelolaan keuangan, pengevaluasian keuangan, dan penyusunan pelaporan keuangan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dari 27 SKPD masing-masing SKPD peneliti mengambil 4 orang responden terdiri dari Kasubbag Keuangan, Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penyimpan Barang. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, faktor yang paling dominan yaitu kompetensi sumber daya manusia hal ini di sebabkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang mengerti tata cara pengelolaan keuangan.

Kata Kunci : Sumberdaya Manusia, Manajemen Keuangan, Peran Auditor Internal

PENDAHULUAN

Memasuki era otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, perubahan yang cukup fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah :“Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan penuh pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan pelaksanaan Permendagri 21 tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pembenahan diri baik dalam sumber daya manusia (SDM) maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Berdasarkan kriteria tersebut bahwa pelaporan keuangan dapat diketahui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. sesuai dengan pendapat Payanta (2006) bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dan laporan tersebut.

Proses akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam laporan hasil pemeriksaannya (LHP), BPK menyatakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit tersebut. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tidak langsung dapat dilihat dan opini BPK ini, kualitas informasi LKPD secara umum masih belum maksimal atau lemah. Capaian opini LKPD pada pemerintahan dalam Provinsi Jambi belum memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian bersih dan jelas dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasil Iktisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK 2015 hanya 3 pemerintahan daerah Provinsi Jambi yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP),

yaitu Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan 9 Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi hanya mendapat opini WDP, dan hasil pemeriksaan tahun 2015 terdapat 3 Kabupaten yang mengalami penurunan opini WTP dan WTP-DPP menjadi WDP, masih banyaknya pengelolaan keuangan yang menjadi temuan dari BPK ini berarti pemerintahan dalam Provinsi Jambi belum menunjukkan hasil kualitas laporan yang sesuai dengan harapan.

Dari kajian fenomena-fenomena tersebut diatas untuk memenuhi standar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas sesuai dengan tuntutan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan maka Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dari PPK yang menjadi kendala teknis bagi mereka untuk memahami sistem akuntansi, sehingga para PPK kesulitan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, pada umumnya latar belakang PPK-SKPD dalam Kabupaten Kerinci bukan berlatar belakang Akuntansi, mereka yang berlatar belakang Akuntansi hanya terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan kabupaten Kerinci, PPK-SKPD hanya menggantikan pelatihan atau bimbingan teknis tentang sistem akuntansi yang diadakan secara singkat dan tidak pernah mengikuti bimbingan teknis tentang sistem akuntansi Kursus Keuangan Daerah (KKD), begitu kompetensi sumber daya manusia pada masing-masing PPK-SKPD guna dapat menyelesaikan problem akuntansi dan dapat melakukan penyajian laporan keuangan dan informasi keuangan dan secara memadai sebagaimana dikehendaki dalam Standar Akuntansi pemerintah. Selain itu pentingnya perangkat pendukung untuk memudahkan aparatur untuk menjalankan sistem akuntansi pemerintah berbasis teknologi, sehingga perangkat pendukung ini menjadi salah satu alat untuk proses sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sistem ini mencatat dan merekam seluruh proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci agar efisiensi dan efektivitas ketepatan waktu tercapai. Dan juga fungsi auditor internal Kabupaten Kerinci masih banyak bersifat korektif dan belum preventif, masih terdapat hasil pengawasan yang dibekukan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian yang merupakan salah satu fungsi akuntansi belum diterapkan secara utuh. Hal tersebut menyebabkan peran aparat pengawasan internal pemerintah belum efektif dalam menciptakan sistem peringatan dini.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah dan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian juga bermaksud untuk menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama tetapi lokasi yang berbeda dan jumlah populasi yang lebih banyak sehingga akan memperkuat teori yang ada dan dapat digeneralisasikan.

METODE PENELITIAN

Data yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode survei. Penggunaan penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari deskripsi dan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan pendekatan survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada, tidak perlu

diperhitungkan hubungan antara variabel-variabel, lebih menggunakan data yang ada untuk pemecahan masalah dari pada pengujian hipotesis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu SKPD yang ada dalam Kabupaten Kerinci dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan). Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara, diskusi dan penyebaran kuesioner. Kriteria responden dalam penelitian ini SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib secara menyeluruh dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan SKPD yang melaksanakan Urusan Pilihan pemerintahan daerah, Kriteria responden dalam penelitian ini mereka yang berkaitan dan terlibat langsung secara teknis dengan pengelolaan keuangan, pengevaluasian keuangan, dan penyusunan pelaporan keuangan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dari 27 (dua puluh tujuh) SKPD masing-masing SKPD peneliti mengambil 4 orang responden terdiri dari Kasubbag Keuangan, Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penyimpan Barang.

Analisis Data

Metode Analisis

a. Deskriptif Kuantitatif

Merupakan suatu cara menganalisa data hasil penelitian melalui kuesioner dituangkan dalam bentuk tabel dan di tabulasi serta diinterpretasi dan data kualitatif menjadi kuantitatif dengan perhitungan yang dibantu menggunakan skala Likert. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini mempunyai gradasi dari sangat setuju (skor 4), setuju (skor 3), kurang setuju (skor 2) dan tidak setuju (skor 1).

b. Data hasil wawancara dituangkan dalam bentuk kesimpulan, hasil tanya jawab secara verbal (kalimat).

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan tahapan:

- a. Klasifikasi data, dalam hal ini data yang diperoleh diklarifikasikan dalam kelompok data kualitatif.
- b. Tabulasi data, data yang telah diklarifikasikan dimasukkan ke dalam tabel-tabel.
- c. Interpretasi data diberikan ulasan secara kualitatif.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas data instrument pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Correlated Item-Total Correlation* pada setiap butir pertanyaan dengan nilai r tabel produk moment. Jika *Correlated Item-Total Correlation* hitung $>$ nilai r tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2005). Untuk melakukan pengujian validitas instrument dilakukan dengan kriteria suatu instrumen sebagai berikut :

r hitung > r tabel 0,05 (valid) dan r hitung < r tabel 0,05 (tidak valid)

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan alat ukur untuk kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawabannya dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Gozali (2005) menyatakan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Repeated Measure atau pengukuran ulang dilakukan dengan cara memberikan kuisioner (pertanyaan) yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah responden tetap konsisten dengan jawaban.
- b. One Shot atau pengukuran sekali saja dilakukan dengan cara hanya sekali saja kuisioner diberikan kepada responden dan kemudian hasilnya dibandingkan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Pengujian reliabilitas kuisioner dalam penelitian ini menggunakan one shot atau pengukuran sekali saja dan untuk pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005). Untuk melakukan pengujian reliabilitas kuisioner dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS).

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menemukan apakah ada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, perangkat pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan uji parsial dan simultan dengan menganalisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, perangkat pendukung dan Peran Auditor Internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik. Adapun bentuk matematis analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah

X1 = Kompetensi Sumber daya manusia

X2 = Perangkat Pendukung

X3 = Peran Auditor Internal

= Konstanta

= Koefisien Regresi

e = Error

Untuk menguji hipotesis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji F

Melakukan Uji F untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F atau biasa disebut dengan Analysis of Variance (Anova). Pengujian Anova dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel atau melihat tingkat signifikansi pada tabel Anova. Pengujian dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila F-hitung > dan F-tabel (α) 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, dan sebaliknya apabila F-hitung < dan F-tabel (α) 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan apabila hasil signifikansi pada table Anova < (α) 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak, sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel Anova > (α) 0,05 maka H1 ditolak atau H0 diterima.

2. Uji t

Melakukan uji t untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang menganggap

variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Apabila t-hitung > t-tabel dengan tingkat keyakinan (*level of significant*) misalnya sebesar 95%, maka H1` diterima dan H0 ditolak, sebaliknya apabila t-hitung < t-tabel maka H1 ditolak dan H0 diterima. Dapat juga dilihat dari tingkat signifikansi yaitu hasil signifikansi < 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak, sebaliknya apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka H1 di tolak dan H0 di terima.

3. Analisis Koefisian Determinasi (R2)

Menentukan besarnya nilai koefisian determinasi (R2) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 ($0 \leq R \leq 1$), semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. Semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dan variabel dependen. Untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan nilai R Square yang disesuaikan atau Adjusted R Square. Nilai R Square maupun Adjusted R Square dikatakan baik jika nilai di atas 0,5 (Gozali, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menemukan apakah ada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, perangkat pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik. Pengujian hipotesa dan hasil analisis regresi berganda diberikan sebagai berikut:

Uji F

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikan dengan () 0,05 apabila tingkat signifikan lebih besar dari () 0,05 maka dapat disimpulkan kompetensi sumber daya manusia (X1), perangkat pendukung (X2) dan peran auditor internal (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Demikian pula dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila F-hitung > dan F-tabel () 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, dan sebaliknya apabila F-hitung < dan F-tabel (á) 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan apabila hasil signifikansi pada table Anova < () 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak, sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel Anova > () 0,05 maka H1 ditolak atau H0 diterima.

Indikator signifikansi dilakukan pengujian dengan bantuan alat uji statistik metode Fisher (Uji F) dengan tingkat keyakinan (*confident level*) sebesar 95%. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1. Uji F Model Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,051	3	1,017	74,610	,000(a)
Residual	1,418	104	,014		
Total	4,468	107			

a Predictors: (Constant), log_X3, log_X2, log_X1

b Dependent Variable: log_y

Dari Tabel 4.26 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 74,61 sedangkan F-tabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 3,08. Hal ini berarti bahwa nilai F-hitung > F-tabel ($74,61 > 3,08$), hal ini memberikan arti bahwa variabel-variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia (X1), perangkat pendukung (X2), peran auditor internal (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia (X1), perangkat pendukung (X2), peran auditor internal (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) secara bersama-sama tidak dapat ditolak (H1 diterima sedangkan H0 ditolak).

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk regresi linier berganda menggunakan nilai R Square yang disesuaikan atau Adjusted R Square. Nilai R Square maupun Adjusted R Square dikatakan baik jika nilai di atas 0,5 (Gozali, 2005). Semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dan variabel dependen. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Koefisien Determinasi Model Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,826(a)	,683	,674	,11675

a Predictors: (Constant), log_X3, log_X2, log_X1

b Dependent Variable: log_y

Dari Tabel 2 bahwa antara variabel devenden dan variabel independen saling berpengaruh, nilai *Adjusted R square* di atas yaitu 67,4% artinya bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dapat di jelaskan oleh kompetensi sumber daya manusia (X1), perangkat pendukung (X2), peran auditor internal (X3) berpengaruh sebesar 0,674 atau 67,4% sedangkan 33,6% dipengaruhi dengan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, faktor lain seperti komitmen, regulasi, dan ketepatan waktu dalam penelitia Tarigan (2008), dan pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam penelitian Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar (2010).

Uji t

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikan dengan () 0,05 apabila tingkat signifikan lebih besar dari () 0,05 maka dapat disimpulkan kompetensi sumber daya manusia (X1), perangkat pendukung (X2) dan peran auditor internal (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Apabila t-hitung > t-tabel dengan tingkat keyakinan (*level of significant*) misalnya sebesar 95%, maka H1` diterima dan H0 ditolak, sebaliknya apabila t-hitung < t-tabel maka H1 ditolak dan H0 diterima. Berikut Dapat dilihat dari tingkat signifikansi yaitu hasil signifikansi < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, sebaliknya apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka H1 di tolak dan H0 di terima. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3. Uji t Model Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
(Constant)	,092	,238		,387	,699		
Log X1	,819	,079	,639	10,311	,000	,794	1,259
Log X2	,123	,039	,200	3,180	,002	,768	1,302
Log X3	,079	,031	,165	2,579	,011	,744	1,345

a Dependent Variable: log_y

Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa t-hitung seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 10,311 kompetensi sumber daya manusia (X1), 3,180 perangkat pendukung (X2), 2,579 peran auditor internal (X3) sedangkan t-tabel pada tingkat keyakinan 95% adalah 1,659 Karena t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak. Dengan demikian daerah penerimaan hipotesis berada di luar daerah penerimaan H0.

- a. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) sebesar 0,819 dan tandanya positif bermakna jika variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) semakin baik, maka akan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan semakin baik.
- b. Koefisien regresi variabel perangkat pendukung (X2) sebesar 0,123 dan tandanya positif bermakna jika variabel perangkat pendukung (X2) semakin baik, maka akan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan semakin baik.
- c. Koefisien regresi variabel peran auditor internal (X3) sebesar 0,079 dan tandanya positif bermakna jika variabel peran auditor internal (X3) semakin baik, maka akan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan semakin baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung, peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan nilai koefisien determinasi 60.6% maka hal ini menandakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung, peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah cukup erat. Pengaruh yang cukup erat ini disebabkan oleh masih belum maksimalnya pengetahuan tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Umumnya responden masih sedikit kesulitan untuk mengikuti sistem akuntansi keuangan daerah yang baru. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, pengetahuan tentang teknologi informasi dan peran auditor internal yang masih bersifat korektif belum preventif.

Kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya apabila kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada seluruh SKPD di Kabupaten Kerinci dilaksanakan dengan baik maka akan menunjang pencapaian kualitas laporan keuangan .

Dengan adanya perangkat keras yang memadai maka output dapat dihasilkan. Output dihasilkan secara memadai maka siklus akuntansi dapat dijalankan sehingga dapat mendukung kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Auditor internal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan, seharusnya auditor internal daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk memudahkan setiap SKPD di unit kerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien

Saran

Dalam hal ini pejabat pada instansi pemerintah Kabupaten Kerincibelum cukup mampu memahami sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan perhitungan anggaran guna terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menandakan bahwa jika pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah ditingkatkan maka dapat mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan mudah dipahami.

Hendaknya kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada seluruh SKPD di Kabupaten Kerinciditingkatkan dan distribusikannya aparatur yang mengerti akan pengelolaan keuangan pada tempatnya maka akan menunjang pencapaian kualitas laporan keuangan.

Peranauditor internal pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan mulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan, keberadaan para auditor internal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan, maka kualitas auditor internal Kabupaten Kerinci perlu ditingkatkan.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data secara lebih komprehensif baik tentang pengumpulannya maupun kedalaman informasi yang dapat diperoleh dari instrumen yang digunakan, hal tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung pada responden yang berkopoten disamping penyebaran kuesioner.

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara lebih jauh, dikonfirmasi kembali ke data sekunder berupa analisis laporan keuangan yang sudah diaudit melalui pola pengumpulan dan pengolahan data seperti yang dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk menuju predikat WTP bagi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Tesis. Tidak dipublikasikan Universitas Sumatera Utara
- Azhar, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Teseis.Medan, Tidak dipublikasikan Universitas Sumatera Utara
- Badan Pemeriksaan Keuangan, 2015, "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Semester Satu (I) dan Dua (II) Tahun 2015 untuk Tahun Anggaran 2014” Jakarta-Indonesia . <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jambi, 2009, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008”, Jambi-Indonesia. <http://www.jambi.bpk.go.id>
- , 2010, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2009”, Jambi-Indonesia. <http://www.jambi.bpk.go.id>
- , 2011, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010”, Jambi-Indonesia. <http://www.jambi.bpk.go.id>
- , 2012, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2011”, Jambi-Indonesia. <http://www.jambi.bpk.go.id>
- , 2013, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2012”, Jambi-Indonesia. <http://www.jambi.bpk.go.id>
- , 2014, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013”, Jambi-Indonesia. <http://www.jambi.bpk.go.id>
- , 2015, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014”, Jambi-Indonesia. <http://www.jambi.bpk.go.id>
- Batubara, 2008, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksaan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi empiris pda Bawasko Medan, Tesis, Tidak dipublikasikan Universitas Sumatera Utara
- Cockrell dan Susan R. Austin, 2010, Financial Statment Quality: A Comparison Of Small And Large Cities, Jurnal Ekonomi Bisnis
- Djalil, R, 2015, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi, RMBOOKS PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta
- Darsie, N, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, PT. Indeks, Jakarta
- Eka Novitasari, 2014, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Universitas Lampung
- Eka Widyaningtias, 2014, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kapasitas Auditor Internal terhadap Kulititas Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Jabodetabek, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Gaa and Thore, 2004, Basic Accounting Education in Asia, Education of Journal, Elsevier, London.
- Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A, 2014. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta
- , 2007, Akuntansi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIMYKPN, Yogyakarta

- Halim, Damayanti, Theresia, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta
- I Putu Upabanyu Rama Mahaputra, 2014, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Jurnal Akuntansi
- Ifa Ratifah, 2012, Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sitem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah, Jurnal Ekonomi
- Kenneth, Loudon and Jane, 2008, Management Information Systems, Nine Edition, Thomson Willey and Sons, New York.
- Lusi Novita Sari, 2014, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, Jurnal Ekonomi
- Mardiasmo, 2006, “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik; Suatu sarana GOOD Governance” Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Matindas, R, 2002, Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha, Edisi II, Grafiti, Jakarta.
- Mochammad Ridwan, 2012, Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah, Jurnal Ekonomi
- P. Ayu Ratna Dewi, 2014, Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Jurnal Akuntansi
- Payanta, 2006, Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi dan Opini Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 6, No. 1
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembendaharaan Negara
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Sebagai Daerah Otonomi
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintah
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- Safriada Yuliani, DKK, 2010, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sitem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi
- Stergiorgios Tasiou, Michalis Beakiaris, 2012, Auditor's perceptions of financial reporting quality; The case of Greece, Jurnal Akuntansi
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung, CV Alfabeta
- , 2006, Metode Penelitian Bisnis, Edisi Sembilan. Bandung, CV Alfabeta
- , 2003, Metode Penelitian Administrasi, Edisi Sembilan. Bandung, CV Alfabeta
- Tanjung, Abudl Hafiz, 2012, Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Pendekatan Teknis Sesuai Dengan PP No.71 Tahun 2010, Bandung, CV Alfabeta
- Tantriani Sukmaningrum, 2011, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. Jurnal Ekonomi
- Tarigan, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keerhasilan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Jurnal ekonomi